

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Banjir bandang, tanah longsor, kebakaran hutan, hilangnya keanekaragaman hayati di darat dan di lautan, penipisan lapisan ozon, pemanasan global dan perubahan iklim, kekeringan, naiknya permukaan laut, tercemarnya sungai, air tanah, danau dan laut, tercemarnya udara dan timbulnya macam penyakit baru adalah hanya sebagian kecil dari akibat kerusakan lingkungan yang makin hari makin mengancam kelangsungan hidup seluruh makhluk bumi. Pendeknya, permasalahan lingkungan makin hari makin menakutkan karena seiring dengan perkembangan industri dan pertambahan jumlah penduduk yang tak terkontrol khususnya di negara-negara berkembang, kualitas lingkungan dunia makin memprihatinkan bahkan ada yang tidak dapat diperbaiki dan dipulihkan kembali seperti sediakala (*irreversible environmental damage*).<sup>1</sup>

Sementara itu Takdir Rahmadi menyatakan penyebab terjadinya permasalahan lingkungan yang terus meningkat dewasa ini didominasi oleh 5 faktor utama, yakni: teknologi, pertumbuhan penduduk, ekonomi, politik dan tata nilai.<sup>2</sup> Perkembangan industrialisasi yang semakin pesat dapat dikategorikan dalam faktor ekonomi yaitu keinginan untuk mengeruk keuntungan dengan memanfaatkan sebesar-besarnya sumber daya alam, memacu perusahaan atau pemilik modal untuk mengeksploitasi sumber daya alam yang ada dalam suatu negara, yang secara kumulatif mengakibatkan penurunan kualitas dan kuantitas sumber daya tersebut. Oleh karena itu faktor ekonomi dalam suatu negara dapat dikatakan sebagai salah satu pemicu terjadinya kerusakan lingkungan.

Sebagai contoh adalah penambangan atau penggalian secara buta yang dilakukan oleh operator tambang di Nigeria telah menyebabkan lubang galian yang gagal sehingga menyebabkan hancurnya ekosistem, hilangnya nyawa manusia dan efek kesehatan lainnya.<sup>3</sup> Begitu juga dengan Urbanisasi yang terjadi

---

<sup>1</sup> Laode M Syarif dkk, “*Hukum Lingkungan Teori, Legislasi dan Studi Kasus*” Jakarta, USAID, 2010, hal 2

<sup>2</sup> Takdir Rahmadi, *Edisi Kedua: Hukum Lingkungan di Indonesia*, Rajawali Pers, 2018, hal 199.

<sup>3</sup> Nwachukwu M. A dan Huan Feng, *Environmental Hazards And Sustainable Development Of Rock Quarries, Lower Benue Trough Nigeria*, OIDA International Journal of Sustainable Development, Vol 05, Issue 06, 2012, hal 52

sangat cepat lebih dari satu abad di New Jersey Amerika Serikat telah menyebabkan kerusakan ekologi lingkungan terutama Daerah Aliran Sungai. Studi menunjukkan ada interaksi dinamis antara lingkungan alam dan manusia dalam jangka panjang berdampak pada lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.<sup>4</sup>

Selain itu ekspansi perkebunan kelapa sawit skala besar yang dilakukan secara diam-diam tanpa akses legal tetapi atas dasar kekuasaan seperti yang terjadi Indonesia telah pula memberikan perubahan lanskap ekologis berupa perubahan tutupan lahan, deforestasi dan hilangnya keanekaragaman hayati.<sup>5</sup> Begitu juga dengan Mesir yang dalam puluhan tahun mengalami peningkatan pertumbuhan populasi, urbanisasi yang intens, dan polusi industri yang hampir tidak terkendali telah memberikan tekanan pada lingkungan Mesir.<sup>6</sup> Logam berat dalam limbah industri dan emisi yang mencemari udara dan persediaan air bersih menipis, meningkatkan risiko bagi banyak orang Mesir terhadap berbagai macam penyakit seperti kanker, gangguan pernapasan dan kerusakan otak.<sup>7</sup> Degradasi lingkungan yang terjadi di Delta Stata Nigeria akibat eksplorasi minyak yang berlebihan juga membawa dampak buruk bagi masyarakat, yaitu terjadi 235 kasus Diare, 187 kasus Asma, 511 kasus mata infeksi, 90 kasus Bronkitis dan 157 kasus infeksi kulit.<sup>8</sup>

Sejak revolusi industri, kondisi iklim dunia telah memburuk karena semakin meningkatnya jumlah polutan udara yang disuntikkan ke atmosfer. Hal ini berdampak buruk bagi kesehatan organisme hidup, tanaman, dan lingkungan yang menampungnya. Struktur bangunan tidak ketinggalan dalam dampak buruk polusi udara karena komponen logam mudah teroksidasi sehingga menimbulkan korosi.<sup>9</sup>

---

<sup>4</sup> Huan Feng dkk, *System Dynamic Model Approach for Urban Watershed Sustainability Study*, OIDA International Journal of Sustainable Development, Vol 05, Issue 06, 2012, hal 70

<sup>5</sup> Bayu Eka Yulian dkk, *Silent Expansion of Oil Palm Plantation: The Tragedy of Access Between Bundle of Right and Power*, Journal of Economics and Sustainable Development, Vol.11, No.6, 31 Maret 2020, hal 71

<sup>6</sup> Sherifa Fouad Sherif, *Environmental Reform in Egypt: The Past Mistakes, Present Situation and Future Perspectives*, Journal of Environment and Earth Science, Vol.4, No.23, 2014, hal 196

<sup>7</sup> *Ibid*, hal 196

<sup>8</sup> T.E Ogbija, *Effects of Environmental Degradation on Human Health in Selected Oil Communities in Delta State*, Journal of Environment and Earth Science, Vol.5, No.9, 2015, hal 72

<sup>9</sup> Ben Uchechukwu Ngene, *Effect of Climate Change Pollutants on the Corrosion Rate of Steel in Rural, Urban and Industrial Environments*, Journal of Environment and Earth Science Vol 5, No 16, 2015, hal 75

Menurut Prof Absori kerusakan lingkungan disebabkan oleh kegiatan industri, pertambangan, transportasi, dan pertanian. Kegiatan-kegiatan itu menjadi penyumbang kerusakan lingkungan seperti kerusakan instalasi, kebocoran, pencemaran (darat, laut dan udara), buangan penambangan, rusaknya lahan bekas pertambangan. Kegiatan-kegiatan itu merupakan mesin ideologi kapitalisme. Ideologi kapitalisme, dianggap sebagai penanggung jawab utama atas kerusakan dan pencemaran lingkungan global. Persoalannya, ideologi kapitalisme bukanlah ideologi yang berdiri sendiri. Akan tetapi, ia merupakan ideologi yang mewakili zaman, dan merupakan bagian dari ritme sejarah peradaban manusia, terutama masyarakat Barat. Kapitalisme hanyalah sebab yang terlihat di permukaan, akan tetapi ada spirit teologi dan filosofis yang menjadi penyokong kapitalisme yakni sumbangsih ajaran Kristiani dan filsafat moral-etik hedonis, pragmatis, dan materialis, yang mengukur kebaikan dan kebenaran dari akumulasi materi, kemanfaatan sesaat dan duniawi semata.<sup>10</sup>

Eksploitasi sumber daya alam yang jika tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan permasalahan terhadap masyarakat yang berada di sekitar aktivitas eksploitasi tersebut. Ada banyak contoh permasalahan lingkungan hidup yang pada akhirnya menjadi sengketa. Salah satu Contoh adalah Putusan MA dalam kasus Republik Indonesia vs Kim Young Woo. Kim Young Woo adalah direktur dari PT. Dongwoo Environmental Indonesia, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan limbah B3 dan telah memperoleh izin pengolahan limbah B3 berdasarkan SK Kepala Bapedal No. KEP-154/BAPEDAL/12/2001 tanggal 1 07 Desember 2001, dan telah diperpanjang berdasarkan SK Menteri LH No. No.79 Tahun 2005.<sup>11</sup> Dalam kasus ini, terdakwa yaitu Kim Young Woo didakwa berdasarkan Pasal 41 (1) UU No. 23 Tahun 1997 (untuk dakwaan primair), Pasal 43 (1) UU No. 23 Tahun 1997 Jo Pasal 45 UU No. 23 Tahun 1997 (untuk dakwaan subsidair), Pasal 42 (1) UU No. 23 Tahun 1997 (untuk dakwaan lebih subsidair), dan Pasal 44 (1) UU No. 23 Tahun 1997 (untuk dakwaan lebih subsidair lagi).<sup>12</sup> Mahkamah Agung menyatakan bahwa “perbuatan Terdakwa

---

<sup>10</sup> Absori, Dimiyati K, Ridwan, *Makna Pengelolaan Lingkungan Pespektif Etik Profetik*, Jurnal Al-Tahrir, Vol. 17, No. 2 (November 2017) hal 335.

<sup>11</sup> Mahkamah Agung, Putusan No. K/Pid .Sus /2010, Republik Indonesia v. Kim Young Woo (2010), hal. 2.

<sup>12</sup> Mahkamah Agung, Putusan No. K/Pid .Sus /2010, Republik Indonesia v. Kim Young Woo (2010), hal. 86.

dilakukan dalam kedudukan sebagai Presiden Direktur PT. Dongwoo Environmental Indonesia yang bergerak di bidang Pengelolaan Limbah B3.....”<sup>13</sup> Atas dasar itu, MA menyatakan bahwa “Terdakwa PT. Dongwoo Environmental Indonesia dalam hal ini diwakili oleh Kim Young Woo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana”, dan karenanya “menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah ) dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan”.<sup>14</sup>

Contoh lain adalah Putusan MA No. 1405 K/Pid.Sus/2013 menyatakan Terdakwa PT. Karawang Prima Sejahtera Steel (PT. KPSS), yang dalam hal ini diwakili oleh Wang Dong Bing terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Izin Melakukan Dumping Limbah Ke Media Lingkungan”; menghukum Terdakwa Wang Dong Bing PT. Karawang Prima Sejahtera Steel (PT. KPSS) dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan; menghukum Terdakwa PT. Karawang Prima Sejahtera Steel (PT. KPSS) dengan pidana denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Dari putusan MA No. 1405 K/Pid.Sus/2013 tersebut terungkap bahwa yang menjadi pelaku tindak pidana adalah PT. Karawang Prima Sejahtera Steel (PT. KPSS) sebagai badan hukum atau korporasi, bukan Wang Dong Bing sebagai Person.<sup>15</sup> Berkaitan dengan hal tersebut, maka yang bertanggung jawab adalah PT. Karawang Prima Sejahtera Steel (PT. KPSS) bukan Wang Dong Bing sebagai person. Mencermati putusan tersebut, maka MA tidak konsisten dalam menentukan siapa subjek atau pelaku tindak pidana tersebut.

Kasus lain adalah penuntutan melalui jalur pidana oleh masyarakat atas pencemaran Anak Sungai dan Sungai Bengawan Solo karena pembuangan limbah oleh beberapa perusahaan. Sungai-sungai tersebut tidak dapat dimanfaatkan karena tercemar partikel tembaga (Cu), Merkuri (Hg) Kadnium (K).<sup>16</sup>

---

<sup>13</sup> Mahkamah Agung, Putusan No. K/Pid .Sus /2010, Republik Indonesia v. Kim Young Woo (2010), hal. 94.

<sup>14</sup> Mahkamah Agung, Putusan No. K/Pid.Sus/2010, Republik Indonesia v. Kim Young Woo (2010), hal. 95.

<sup>15</sup> Lihat Putusan Mahkamah Agung, No. 1405 K/Pid.Sus/2013, Republik Indonesia vs PT. Karawang Prima Sejahtera Steel (PT. KPSS)

<sup>16</sup> Absori, “*Hukum Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup*” Sukoharjo, UMS Press, 2014, hal 7

Pembangunan merupakan upaya untuk melakukan perubahan, tetapi seiring dengan terjadinya perubahan terdapat dampak positif dan negatif dari pembangunan. Dampak positif dari pembangunan dapat dilihat dari kemajuan-kemajuan yang telah dicapai seperti kemajuan teknologi, industri, pembangunan gedung-gedung untuk perkantoran dan perhotelan, perbaikan sarana transportasi dan komunikasi, meningkatnya taraf kesejahteraan masyarakat dan lain sebagainya. Adapun dampak negatif pembangunan dapat dilihat dari makin sempitnya lahan pertanian akibat perkembangan penduduk dan pembangunan pabrik-pabrik, meningkatnya angka pengangguran, meningkatnya angka kriminalitas dan kerusakan-kerusakan di bidang lingkungan hidup. Ini terjadi tidak hanya di perkotaan, tetapi juga di pedesaan.

Industri merupakan salah satu bidang perekonomian yang menjanjikan dalam kesuksesan. Bahkan salah satu tolok ukur suatu negara dikatakan maju adalah apabila mata pencaharian penduduknya yang semula di bidang pertanian dapat beralih ke bidang industri. Industri di dunia pun ada banyak sekali macamnya, ada industri makanan, industri tekstil, industri pembuatan elektronik, industri pembuatan alat transportasi, hingga pembuatan alat-alat berat. Berkembangnya industri pada akhirnya akan berdampak pada pencemaran jika tidak dikelola dengan baik. Pencemaran yang pada intinya adalah dimasukkannya sesuatu yang dapat menyebabkan materi awalnya menjadi berkeadaan tidak baik dan menyimpang dari fungsi yang sebenarnya. Sementara itu sesuatu yang dapat menyebabkan pencemaran ini sangat beragam (baca: dampak pencemaran air), yakni bisa berupa makhluk hidup, zat, energi maupun komponen-komponen lain. Sesuatu yang menyebabkan pencemaran ini biasanya disebut dengan limbah. Limbah ini dapat kita temukan dalam keseharian kita bahkan apa saja aktivitas manusia, sangat berpotensi menghasilkan limbah.

Kabupaten Sukoharjo merupakan salah satu kabupaten yang cukup menonjol dalam sektor industri. Di Kabupaten ini telah beroperasi PT. Rayon Utama Makmur (RUM) yang merupakan anak perusahaan PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) yang berlokasi di Plesan, Nguter, Sukoharjo, sekitar 15 km dari Kota Surakarta. PT RUM memproduksi Serat rayon (kapas sintetik) untuk memasok kebutuhan lini bisnis utama Sritex yaitu garmen. Sebagai sebuah perusahaan yang memasok serat rayon, PT. RUM Sukoharjo ternyata menghasilkan limbah industri

berupa polusi udara yaitu bau busuk limbah pabrik dan polusi limbah cair yang di buang ke sungai. Limbah tersebut sangat meresahkan masyarakat di sekitar pabrik dan bahkan dirasakan juga oleh masyarakat dengan radius 60 km. Dalam hal ini perusahaan tidak mampu mengelola residu industri sehingga limbah dari pabrik tersebut menimbulkan aroma yang tidak sedap. Polusi tersebut juga berdampak pada kesehatan warga.

Berdasarkan audiensi dengan warga Desa Plesan dengan PT RUM pada 19 Januari 2018, terdapat kesimpulan bahwa PT RUM tidak dapat mengatasi permasalahan limbah yang mencemari sungai. Konsekuensinya pada tanggal 24 Februari 2018, PT Rayon Utama Makmur (RUM) terpaksa *shut down* atau di tutup.<sup>17</sup>

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik mengkaji lebih dalam tentang penegakan hukum dalam sengketa lingkungan yang terjadi di PT RUM Sukoharjo.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah penegakan hukum yang dilakukan dalam penyelesaian sengketa lingkungan di PT RUM ?
2. Bagaimanakah konsep ideal penegakan hukum untuk menyelesaikan sengketa lingkungan di PT RUM ?

## **C. Kerangka Teori**

“Konflik dalam kehidupan social berarti benturan kepentingan, keinginan, pendapat, dan lain-lain yang paling tidak melibatkan dua pihak atau lebih. William Chang mempertanyakan benarkah konflik sosial hanya berakar pada ketidakpuasan batin, kecemburuan, iri hati, kebencian, masalah perut, masalah tanah, masalah tempat tinggal, masalah pekerjaan, masalah uang, dan masalah kekuasaan? ternyata jawabnya tidak dan dinyatakan oleh Chang bahwa emosi manusia sesaat pun dapat memicu terjadinya konflik sosial.”<sup>18</sup>

Untuk menyelesaikan konflik atau sengketa banyak cara yang dapat ditempuh oleh para pihak yang bersengketa. Seperti Teori yang di dicetuskan oleh

<sup>17</sup> <https://banten.bisnis.com/read/20180309/250/747826/pencemaran-limbah-pabrik-menggugat-tanggung-jawab-korporasi>, di akses tanggal 27 Februari 2019

<sup>18</sup> William Chang, *Dimensi Etis Konflik Sosial*, Dalam KOMPAS Rabu 2 Februari 2001

Lawrence M. Friedman yang menyebutkan bahwa sistem hukum terdiri atas substansi hukum (seperangkat aturan), struktur hukum (penegak hukum), dan kultur hukum atau budaya hukum. Ketiga komponen ini mendukung berjalannya sistem hukum disuatu negara. Secara realitas sosial, keberadaan sistem hukum yang terdapat dalam masyarakat mengalami perubahan-perubahan sebagai akibat pengaruh, apa yang disebut dengan modernisasi atau globalisasi baik itu secara evolusi maupun revolusi.<sup>19</sup>

Menurut Friedman, sistem hukum merupakan unit-unit yang beroperasi dalam batas-batas tertentu yang menggerakkan hukum sebagai kontrol sosial, yang dalam pengkajiannya memiliki karakter dan teknik khusus. Friedman menjelaskan bahwa sistem hukum diawali oleh sebuah input yang berupa bahan-bahan mentah yang masuk pada satu sistem hukum berupa lembaran-lembaran kertas yang menggerakkan proses hukum yang berupa tuntutan yang diajukan dalam suatu pengadilan kemudian hakim mengolah bahan-bahan mentah tersebut secara sistematis sehingga menghasilkan sebuah output yang berupa keputusan atau ketetapan.<sup>20</sup>

Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial tidak lain hanya merupakan ide-ide yang ingin diwujudkan oleh hukum itu. Untuk menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat kearah yang lebih baik, maka bukan hanya dibutuhkan ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktek hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik.<sup>21</sup>

Unsur-unsur dalam teori hukum menurut Lawrence M. Friedman berfungsi sebagai faktor penentu apakah suatu sistem hukum dapat berjalan dengan baik atau tidak.<sup>22</sup> Soerjono Soekanto, mengatakan ketiga komponen ini merupakan bagian faktor-faktor penegakan hukum yang tidak bisa diabaikan

---

<sup>19</sup> Saifullah, "*Refleksi Sosiologi Hukum*", Bandung, Refika Aditama, 2014, hal 26

<sup>20</sup> Lawrence M Friedman, "*Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*" Terj. M.Khozin Cet VII, Bandung, Nusa Media, 2017, hal. 6-13

<sup>21</sup> Munir Fuady, "*Aliran Hukum Kritis: Paradigma Ketidakberdayaan Hukum*", Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2003, hal. 40

<sup>22</sup> Achmad Ali (I), "*Keterpurukan Hukum Di Indonesia*", Jakarta, Ghalia Indonesia, 2002, hal. 8

karena jika diabaikan akan menyebabkan tidak tercapainya penegakan hukum yang diharapkan.<sup>23</sup>

#### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

##### **Tujuan Penelitian**

1. Untuk menjelaskan tentang model penegakan hukum dalam penyelesaian sengketa lingkungan di PT RUM
2. Untuk mengeksplorasi konsep ideal dalam menyelesaikan sengketa lingkungan di PT RUM

##### **Manfaat Penelitian**

1. Untuk mengetahui tentang model penegakan hukum dalam penyelesaian sengketa di PT RUM
2. Untuk mengetahui konsep ideal dalam menyelesaikan sengketa lingkungan di PT RUM

---

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto, *"Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum"*, Jakarta, Rajawali, 1983, hal. 5